

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan berfungsi sebagai penterjemahan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan perangkat daerah.

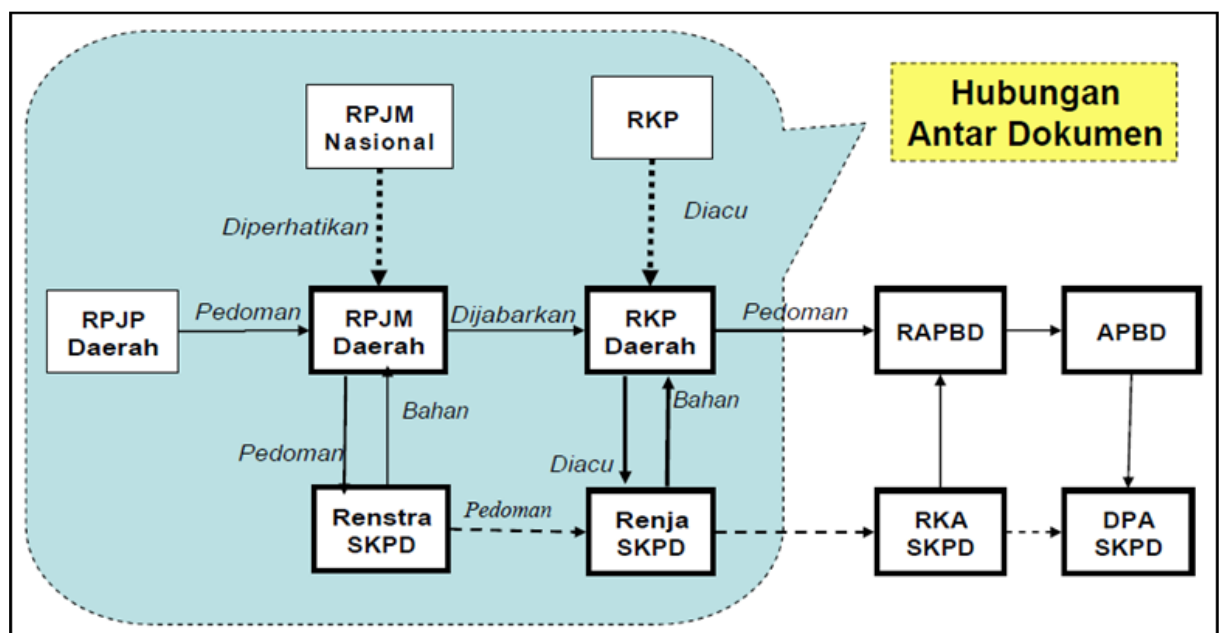
Penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD sehingga penyusunan rancangan Renja dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan RKPD.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti prinsip-prinsip dan tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Sasaran Renja merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah.
2. Renja Perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

4. Disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja tahun-tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.
5. Pengendalian Renja PD
6. Renja PD menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dengan memperhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis lima tahunan perangkat daerah. Kedua dokumen tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu di mana seluruh tahapan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan Renja PD dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lain dapat terlihat pada skema berikut ini:



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 adalah:

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2023. (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 03);
20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1401 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Wewenang, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 839 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antaran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada setiap tahun anggaran.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan

daerah;

6. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.
2. Sebagai media informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam memberikan arah atau gambaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
3. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2020;
4. Agar tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)**

Adapun Sistematika Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Perencanaan untuk tahun yang akan datang didasarkan pada evaluasi hasil program dan kegiatan tahun-tahun lalu serta tahun berjalan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta capaian renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019**

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S.D. TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2018)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10	11 = 10/4
1.5..1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100	<b>100%</b>	<b>50%</b>	
1.5..1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10

1.5..1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	-	-	161 Unit	161 Unit	100	161 Unit	161 Unit	100
		- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan kerja yang diperbaiki	-	-	267 Unit	267 Unit	100	267 Unit	-	
		Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10

		Instalasi Listrik/ Penerangan								
1.5..1.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
1.5..1.23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Tenaga Cleaning Service dan sopir	-	-	31 Orang	31 Orang	100	31 Orang	31 Orang	100

		Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	-	6 laporan	10
<b>1.5.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>-</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>-</b>	<b>75%</b>		
1.5.2.3	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.5	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
1.5.2.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	6 laporan	10
1.5.2.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	60 laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10

1.5.2.30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	- Jumlah peralatan komunikasi yang dipelihara	120 Unit	-	120 Unit	120 Unit	100	120 Unit	120 Unit	100
		- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan peralatan komunikasi	60 laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10
<b>1.5.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>		-			-			
1.5.3.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	115 stel	-	115 stel	115	100	-	-	-
1.5.3.3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	260 stel	-	260 stel	255 stel	-	-	-	-
1.5.3.5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	10 stel	-	10 stel	-	-	-	-	-
<b>1.5.8</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>- Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi</b>	<b>80%</b>	-	<b>80%</b>	<b>80%</b>	-	<b>80%</b>		-
1.5.8.1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	6 laporan	10

1.5.15	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase siskamling tingkat RW yang aktif</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Persentase siskamling tingkat RW yang aktif</b>	70.07%	-	-	-	-	-	-	-
1.5.15.1	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah anggota tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang diperbantukan	90 Orang	-	90 Orang	90 Orang	100	90 Orang	90 Orang	100
		Jumlah Patroli Anggota Linmas	1176 Kali	-	1176	1176	100	-	108 Kali	9,18
1.5.15.3	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan dalam rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10 Kali	-	2 Kali	2 Kali	100	2 Kali	2 kali	10
		Jumlah Anggota Linmas Terlatih	200 Orang	-	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200	20
1.5.15.9	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	jumlah siskamling RW terbina	50 RW	-	50 RW	50 RW	100	50 RW	50 RW	100

<b>1.5.32</b>	<b>Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat</b>	<b>- cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat</b>	<b>75%</b>	-	<b>73.00%</b>	<b>73.00%</b>	-	<b>73.00%</b>		
1.5.32.1	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	- Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	1140 Kali	-	288 Kali	296 Kali	102,77	288 Kali	151 kali	13,24
1.5.32.2	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih	492 Orang	-	492 Orang	492 Orang	100	492 Orang	492 Orang	100
		Jumlah pelatihan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait	10 Kali	-	2 Kali	2 Kali	100	2 Kali	2	20
1.5.32.3	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	Jumlah Bintek penanganan Perkara Pelanggaran Perda	15 Bintek	-	3 Bintek	-	-	3 Bintek	2	13,33
		Jumlah PPNS yang mengikuti Bintek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda	400 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100	80 Orang	80 Orang	20
<b>1.5.33</b>	<b>Progam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>		

	<b>dan Dukungan Logistik</b>									
	<b>Progam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-		
1.5.33.1	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	jumlah operasi yang bekerja sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum	120 Operasi	-	24 Operasi	24 Operasi	100	24 Operasi	12	10
1.5.33.2	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Patroli	1080 Kali	-	1080 Kali	1096 Kali	100,92	1080 Kali	550 Kali	50,92
		- Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif	60	-	-	-	-	30 Kali	30 Kali	50
1.5.33.3	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Dukungan logistik operasi penertiban pelanggaran perda dan perwal	-	-	365 Operasi	365 Operasi	100	365 Operasi	180	49,31
		Jumlah operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	365 Operasi	-	365	365	100	365	180	49,31



		Jumlah tenaga pekerja harian lepas yang membantu penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	383 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.5.34	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	-	-	100%	100%	-	100%		
		Persentase Penegakan PERDA	100%	-	-	-	-	-		
1.5.34.1	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Operasi pengamatan dan Penggambaran intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	120 Operasi	-	24 Operasi	24 Operasi	100	24 Operasi	12 Operasi	10
1.5.34.2	Kegiatan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda Perwal	- Jumlah sidang yustisi pelanggaran perda dan perwal	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Jumlah laporan triwulanan sidang yustisi	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	2 Laporan	-
1.5.34.3	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	jumlah Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	500 Kali	-	100 Kali	100 Kali	100	100 Kali	50	10

		Jumlah Sidang Yustisi	50 Sidang	-	10	10	100	10	6	12
1.5.34.4	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	- Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	60 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 laporan	10

### A. Capaian Kinerja Tahun Lalu

Dari tabel di atas terlihat pencapaian renja tahun lalu (Tahun 2018) adalah sebagai berikut:

1. Hampir semua program kegiatan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan baik program kegiatan urusan maupun non-urusan. Adapun program-program yang mencapai target yaitu sebagai berikut:
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - c. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;  
dan
  - d. Program Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sebanyak 2 (dua) kegiatan, yaitu:
  - a. kegiatan *Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan* dari target kinerja 260 stel hanya terealisasi 255 stel pakaian atau terealisasi 98%. Hal ini disebabkan terjadi pengurangan jumlah anggota Satpol PP yang pindah dan purna tugas;
  - b. Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS) tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak adanya undangan kegiatan bintek yang diadakan baik di dalam daerah maupun diluar daerah.
3. Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu:
  - a. kegiatan *pembinaan dan penyuluhan perda perwal* dari target penyuluhan 288 kali terealisasi 296 kali atau tercapai 102,77%

- b. kegiatan *pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum* dari target kinerja jumlah patroli sebanyak 1086 kali tercapai 1096 kali atau terealisasi sebesar 100,92%
4. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian renja pada poin nomor 3 (tiga) di antaranya adalah optimalisasi tugas dan fungsi Kepala Unit (kanit) dan Kepala Regu (regu) untuk melakukan patroli dan penertiban baik yang telah dijadwalkan maupun berdasarkan pengaduan masyarakat dan pantauan intelijen Satpol PP Kota Bandung. Koordinasi dan sinergitas yang baik antar-bidang di dalam Satpol PP serta koordinasi dengan OPD terkait dan aparat kewilayahan juga menjadi pendukung keberhasilan ini. Selain itu Optimalisasi fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menyelidik dan menyidik pelanggaran perda dan perwal ikut berperan penting dalam keberhasilan capaian renja di Tahun 2017.
5. Capaian renja tahun berjalan sampai dengan Triwulan II dari 9 (sembilan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan ada 14 (empat belas) kegiatan yang *telah memenuhi target kinerja* sampai triwulan II (capaian 50%).
6. Kegiatan yang pada quarter kedua telah mencapai target kinerja sebesar 100% atau *melebihi target quarter* ada sebanyak 12 (dua belas) kegiatan sedangkan yang masih di bawah target quarter kedua sebanyak 3 (tiga) kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik berdasarkan Nilai, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengemban urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Indikator-indikator kinerja berdasarkan NSPK yang berpedoman pada Undang-undang tersebut. Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI CAPAIAN KINERJA	
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	-	-	65%	63,13%	63,64%	-	62,88%	63,64%	-	-
3	Cakupan Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	79,29	79,57	79,68	-	79,29	79,57	79,68	-

Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang ditetapkan untuk mengukur kinerja pelayanan tidak termasuk ke dalam SPM dan IKK. Meskipun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menetapkan indikator kinerja tetap mengacu pada NSPK yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengemban amanat pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang kemudian diterjemahkan oleh Satpol PP Kota Bandung ke dalam tiga indikator yaitu, (1) *Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda* untuk mengukur ketertiban umum (2) *Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif*, untuk mengukur pelayanan perlindungan masyarakat dan (3) *Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas*, untuk mengukur pelayanan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan (4) *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* untuk mengukur kualitas pelayanan di mata masyarakat yang diberikan oleh Satpol PP Kota Bandung.

### 1. Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda

Indikator ini diukur melalui formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Penyelesaian pelanggaran Perda Perwal}}{\sum \text{Pelanggaran Perda Perwal yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Satpol PP Kota Bandung menargetkan indikator kinerja *cakupan penyelesaian penegakkan perda* pada tahun 2018 sebesar 100% atau dipredikatkan ke dalam kategori **mencapai target**. Hal ini terjadi karena pelanggaran terhadap Perda

Perwal yang pada tahun 2018 sebanyak 2.344 pelanggaran, 2344 pelanggaran yang dapat diselesaikan.

Pada tahun 2018 Satpol PP Kota Bandung mencatat pelanggaran Perda Perwal yang dilaporkan sebanyak 2.344 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Rekap Pelanggaran 2018**

NO	JENIS PELANGGARAN	BIDANG TRANTIBUM	BIDANG PPHD	JUMLAH	KET
1	PKL	1241	-	1241	
2	PMKS	173	-	173	
3	YUSTISI	76	22	98	
4	BANGLI	26	6	32	
5	MINOL	5	19	24	
6	PARKIR LIAR	31	1	32	
7	REKLAME	587	-	587	
8	PERIZINAN	-	198	198	
	<b>TOTAL</b>			<b>2.334</b>	

*\*) Sumber: Bidang Trantibum Duklog dan Bidang PPHD*

Sedangkan pelanggaran yang diselesaikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4**  
**Rekap Penertiban dan Penyelesaian Penegakan Perda Perwal Tahun 2018**

PENERTIBAN/PEMERIKSAAN			PENINDAKAN/PENYELESAIAN								
NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	SIDANG TIPIRING	BIAYA PAKSA	SANKSI ADMINISTRATIF	PENURUNAN/ PENYEGELAN/ STIKER PERINGATAN	GUDANG BARBUK	SERAHKA N KE DINSOS	PENYITAAN/ PEMUSNAHAN	PEMBON GKARAN	TOTAL PENINDAKAN
1	PKL	1241	100	16	676	-	755	-	-	-	1241
2	PMKS	173	-	-	-	-	-	173	-	-	173
3	YUSTISI	98	32	-	-	-	-	66	-	-	98
4	BANGLI	32	-	-	-	6	-	-	-	26	32
5	MINOL	24	-	-	-	-	-	-	24	-	24
6	PARKIR LIAR	32	-	1	62	-	-	-	-	-	32
7	REKLAME	587	-	-	-	596	-	-	-	-	587
8	PERIZINAN	198	-	-	155	43	-	-	-	-	198
	<b>TOTAL</b>	<b>2.334</b>	<b>132</b>	<b>17</b>	<b>893</b>	<b>645</b>	<b>755</b>	<b>239</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>2.334</b>

Untuk capaian tahun berjalan sampai dengan Triwulan II juga terealisasi sebesar 100%. Dari jumlah pelanggaran perda sebanyak 645 pelanggar telah diselesaikan sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Rekap Penertiban dan Penyelesaian Penegakan Perda Perwal Tahun 2019 (s/d Triwulan II)**

PENERTIBAN/ PEMERIKSAAN			PENINDAKAN/PENYELESAIAN								
NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	SIDANG TIPIRING	BIAYA PAKSA	SANKSI ADMINIS TRATIF	PENURUNAN/ PENYEGELAN / STIKER PERINGATAN	GUDANG BARBUK	SERAHKAN KE DINSOS	PENYITAAN/ PEMUS NAHAN	PEMBONGKARAN	TOTAL PENINDAKAN
1	PKL	394	1	-	356	-	37	-	-	-	394
2	PMKS	88		-	-	-	-	88	-	-	88
3	YUSTISI	31	31	-	-	-	-	-	-	-	31
4	BANGLI			-	-	-	-	-	-	-	0
5	MINOL	7	4	-	3	-	-	-	-	-	7
6	PARKIR LIAR	3		-	3	-	-	-	-	-	3
7	REKLAME	78		-	26	-	-	-	52	-	78
8	PERIZINAN	35		-	35	-	-	-	-	-	35
9	PELANGGARAN PERDA K3 LAINNYA	9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
	<b>TOTAL</b>	<b>645</b>									<b>645</b>

Faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran ini di antaranya sebagai berikut:

1. Penegakkan Perda melalui penertiban oleh Bidang Trantibum Duklog dan pemeriksaan pelanggaran oleh Bidang PPHD semakin diintensifkan melalui plotting anggota di titik-titik rawan pelanggaran serta respon cepat bila terdapat pengaduan baik dari masyarakat maupun unsur intelijen Satpol PP Kota Bandung.
2. Kerja sama dengan jajaran samping (TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan) serta dengan aparat kewilayahan juga semakin dioptimalkan baik dalam proses penegakan non-yustisial dan yustisial.
3. Rantai komando penertiban dan penyelesaian pelanggaran perda semakin baik sehingga koordinasi antar pejabat dan anggota yang ditunjuk untuk melakukan penertiban dan penyelesaian pelanggaran perda lebih rapi dan sistematis sehingga semua pelanggaran perda dan perwal dapat diselesaikan.
4. Terdapat 10 Unit dan 30 Regu dengan masing-masing regu berjumlah 15 orang. Dari komposisi tersebut proses penegakkan perda dilakukan melalui plotting dan shift kerja sehingga upaya penegakkan perda menjadi optimal. Selain unit regular dibentuk pula unit khusus yang ditugaskan untuk merespon cepat pegaduan pelanggaran perda perwal. Pemberdayaan PPNS yang ada di Satpol PP Kota Bandung juga turut menjadi faktor keberhasilan capaian kinerja sasaran ini.

5. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum di Kota Bandung juga mulai menunjukkan hasil. Kesadaran akan produk hukum daerah mulai terbangun terlihat dari penurunan pelanggaran dari 3.900 pelanggaran pada tahun 2016 menjadi 2.731 pelanggaran pada tahun 2017.

Dari capaian di tahun 2018, dan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 Satpol PP Kota Bandung optimis memproyeksikan capaian indikator ini pada akhir Tahun 2019 akan memenuhi target atau terealisasi 100%.

## **2. Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif**

Indikator kinerja ini diukur melalui formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Siskamling RW yang aktif}}{\sum \text{RW di Kota Bandung}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan siskamling aktif adalah memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. kepengurusan/kelembagaan
2. Jadwal Piket/Ronda
3. Daftar hadir
4. Buku Laporan Kejadian.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menargetkan indikator kinerja *persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif* pada tahun 2016 sebesar 65%. Dalam pelaksanaannya dari 1.584 RW hanya 996 RW yang memiliki siskamling aktif atau sebesar 62,88% atau tercapai 96,74% dan dipredikatkan ke dalam kategori

***tidak mencapai target.***

Dari hasil evaluasi capaian di tahun 2016 Satpol PP Kota Bandung kemudian mengubah target indikator ini untuk tahun 2017 dari 85% menjadi sebesar 63,13% melalui Renstra Revisi Satpol PP Kota Bandung 2013-2018. Dan di Tahun 2017 ini capaian persentase siskamling tingkat RW yang aktif terealisasi sebesar 63,51% (ada 1006 siskamling aktif dari 1.584 RW) atau tercapai 100,60% atau masuk ke dalam kategori ***melebihi target.***

Faktor pendukung keberhasilan sasaran ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan rutin dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terhadap masyarakat khususnya anggota Linmas untuk turut serta dalam menjaga ketenteraman masyarakat di lingkungannya melalui siskamling aktif.
2. Dukungan dari aparat kewilayahan dan tokoh masyarakat dalam mendukung program jaga lingkungan dan ketenteraman masyarakat di Kota Bandung melalui siskamling.

**3. Cakupan Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas**

Untuk Tahun 2018 Indikator kinerja ini diukur melalui formulasi *laporan kegiatan kondisi unjuk rasa di Kota Bandung* di mana tercapai 100% atau *memenuhi target*. Unjuk rasa yang terjadi di Kota Bandung pada Tahun 2018 berjumlah 5 (lima) yang kesemuanya dapat ditangani dengan baik oleh

Satpol PP Kota Bandung sehingga capaian penanganan unjuk rasa yang kondusif adalah 100%.

**Tabel 6**  
**REKAPITULASI UNJUK RASA TAHUN 2018**

NO	WAKTU	PENGUNJUK RASA	JUMLAH PENGUNJUK RASA	TUNTUTAN	LOKASI
1	Selasa, 13 Februari 2018	Himpunan PKL Jamika	± 200 orang	Menuntut untuk bisa berjualan di Jalan Jamika dan tidak ada penertiban dari Satpol PP	Jl. Wastukencana (Balai Kota Bandung)
2	Kamis, 8 Maret 2018	KSBI	± 100 orang	-----	Jl. Wastukencana (Balai Kota Bandung)
3	Selasa, 8 Mei 2018	Himpunan Angkot Kota Bandung	± 100 orang	Menuntut pelarangan angkutan Online di Kota Bandung	Jl. Wastukencana (Balai Kota Bandung)
4	Jumat, 7 September 2018	Organisasi Kemahasiswaan HMI	± 40 orang	Menuntut kasus pembunuhan munir di buka kembali penyelidikannya	Jl. Asia Afrika (gedung merdeka)

5	Senin, 24 September 2018	Organisasi Kemahasiswaan HMI	± 150 orang	Menuntut tidak adanya pembongkaran di taman sari (rumah deret)	Jl. Asia Afrika (gedung merdeka)
---	--------------------------	------------------------------	-------------	--	----------------------------------

Perhitungan Indikator Cakupan Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Persentase penanganan unjuk rasa} + \text{persentase Patroli}}{2}$$

#### Unjuk Rasa di Wilayah Kota Bandung Tahun 2018

Sedangkan untuk patroli pada tahun 2018 dilakukan sebanyak 1.100 kegiatan dengan dengan 3x shift kerja per hari dari target 1080 kali, hingga capaiannya sebesar 101.85%. Capaian kinerja patroli dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7**  
**Patroli Trantibum Tahun 2018**

NO	WAKTU KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	TRIWULAN I	KALI	270	270	100.00
2	TRIWULAN II		270	277	102.59
3	TRIWULAN III		270	276	102.22
4	TRIWULAN IV		270	277	102.59

*\*) Sumber: Bidang Trantibum Duklog*

#### 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan



pemerintah melalui Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memerintahkan semua Perangkat Daerah melakukan survey kepuasan masyarakat yang diukur menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada Tahun 2018 ditetapkan nilai target IKM untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebesar 79,25 yang hasil penghitungan dari survey terhadap masyarakat tercapai nilai 79,29 atau tercapai 100,18% dan dikategorikan **melebihi target**.

Berikut rekapitulasi hasil survey IKM terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung:

**Tabel 8**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KATEGORI
1	Persyaratan Pelayanan	3,23	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,17	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,19	Baik
4	Biaya/Tarif	3,22	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,25	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,15	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,29	Baik
8	Maklumat Pelayanan	3,18	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,16	Baik
	<b>Nilai Interval IKM</b>	<b>3,17</b>	<b>Baik</b>

Dari tabel di atas nilai interval IKM Satpol PP Kota Bandung sebesar 3,17 yang dikonversikan menjadi 79,29 sesuai dengan standar dari Keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25/M.PAN/2/2004. Nilai interval konversi IKM

tersebut berada dalam kategori **Mutu Pelayanan B** atau dengan kata lain **kinerja unit pelayanannya adalah BAIK** sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9**  
**Nilai Interval Konversi IKM**

NO	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	TIDAK BAIK
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan capaian IKM Satpol PP pada tahun 2018, di Tahun 2019 Satpol PP Kota Bandung menargetkan nilai IKM sebesar 79,57.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum linmas) merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh warga negara. Daerah yang kondusif, tenteram dan tertib, merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas kehidupan warga.

Sebagai salah satu kota besar yang kompleks, Kota Bandung memiliki permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengganggu trantibum linmas, antara lain:

1. *Masih banyak pelanggaran Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.*  
Pelanggaran Perda dan Perwal yang paling banyak ditangani oleh Satpol PP adalah pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

2. *Menjamurnya Ruang Publik.* Salah satu capaian penting dalam pemerintahan Wali Kota yang sekarang adalah pembangunan ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik ini menimbulkan keramaian sehingga berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
3. *Besarnya Jumlah Aktivitas dan daya tarik kota yang kuat* sehingga banyaknya pendatang yang masuk untuk mengadu nasib sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.
4. *Tidak Imbangnya rasio penduduk Kota Bandung dengan jumlah Anggota Satpol PP.* Luas wilayah Kota Bandung dengan 30 (tiga puluh) Kecamatan berbanding dan jumlah Anggota Satpol PP yang kurang dari 400 (empat ratus) orang tentu sebuah perbandingan yang tidak imbang sehingga jangkauan Satpol PP Kota Bandung dalam menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi tidak maksimal.
5. *Kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan.* Di Kota besar seperti Kota Bandung kesadaran warga masyarakat akan penjagaan atau sistem pengamanan wilayah secara swadaya masih belum baik. Tingkat Individualitas lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan sehingga sistem keamanan wilayah belum terbangun optimal.

6. *Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.* Pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang melanggar dan zonasi mana yang termasuk wilayah yang diatur di dalam peraturan masih belum maksimal sehingga pelanggaran Perda dan Perwal masih cukup tinggi di Kota Bandung.
7. *Respon atas pengaduan masyarakat.* Di masa komunikasi dilakukan lebih banyak melalui media sosial, masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran perda perwal dan gangguan tibus tranmas kemudian juga memantau respon dari Satpol PP Kota Bandung. Perubahan komunikasi ini menjadi tantangan bagi Satpol PP Kota Bandung untuk siap sedia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
8. *Belum adanya bantuan hukum bagi Anggota Satpol PP jika terjadi bentrokan.* Aturan yang ada di Kota Bandung hanya pendampingan kelembagaan dan bukan perkara pidana sehingga timbul keraguan bagi Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena ada risiko perkara hukum pidana tersebut.
9. *Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan patroli.* Kendaraan patroli ini, baik mobil maupun motor, dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung dalam rangka menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Motor patroli dibutuhkan dalam pembentukan Unit Reaksi Cepat sebagai tim khusus

dalam merespon cepat pengaduan masyarakat tentang adanya gangguan tibum tranmas serta perlindungan masyarakat.

**Tabel 10**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Arah Kebijakan dan Program Prioritas**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum maksimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dimana diantaranya adalah reformasi birokrasi di dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	Standar kualitas pelayanan publik di Kota Bandung belum baik.	Perangkat daerah di Kota Bandung belum semua meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Belum maksimalnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pelanggaran perda masih cukup tinggi</li> <li>2. Kesadaran masyarakat akan keamanan lingkungan</li> <li>3. Tingkat pemahaman terhadap produk hukum daerah belum tinggi</li> <li>4. Kerja sama antar lembaga dan stakeholder masih belum optimal</li> </ol>

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan

publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu *update* dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung telah mengupayakan beberapa hal salah satunya dengan menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kota Bandung Tahun 2010-2014. Selain menyusun *roadmap*, Kota Bandung termasuk kabupaten/kota yang telah menyampaikan Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui PMPRB *on-line* oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam penerapan *Electronic government* Kota Bandung menjadi salah satu kota yang lebih awal merintis dengan menerapkan *Electronic Procurement* dalam proses pelelangan sejak tahun 2007, setelah itu sejak tahun 2011 dirintis tata kelola perencanaan dan penganggaran Kota Bandung telah terintegrasi berbasis IT, atau dikenal sebagai *Bandung Integrated Resources Management System* (BIRMS). Tahun 2007-2008 Kota Bandung juga melakukan restrukturisasi birokrasi melalui penguatan fungsi badan pelayanan perijinan terpadu, serta penerapan ISO di seluruh perangkat daerah Kota Bandung secara bertahap, dan pada tahun 2015 seluruh layanan perangkat daerah sudah memiliki sertifikat ISO. Ini semua dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah belum optimalnya peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Adanya beberapa kasus oknum PNS Kota Bandung yang terlihat dalam kasus korupsi masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN sebagai komitmen Pemerintah Kota Bandung.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung berupaya mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sumber daya aparatur, dan sistem pengaduan masyarakat atas pelanggaran perda perwal yang cepat tanggap.

Selain meningkatkan kualitas internal dibutuhkan juga kerja sama yang terorganisir dan efektif antar komponen di dalam jajaran Pemerintah Kota. Satpol PP Kota Bandung dalam menyelenggarakan urusan trantibum linmas melakukan kerja sama baik antar perangkat daerah di Pemkot Bandung maupun dengan jajaran samping yaitu TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Selain belum maksimalnya kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandung juga menghadapi permasalahan masih belum maksimalnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum. Masih banyak pelanggaran terhadap perda dan perwal serta gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban

umum baik di tingkat kota maupun wilayah terkecil di Kota Bandung.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan trantibum linmas berupaya melakukan penegakkan terhadap pelanggaran produk hukum daerah secara yustisial maupun non-yustisial. Penegakkan secara yustisial dilakukan melalui proses persidangan dengan hukuman denda atau kurungan badan, sedangkan penegakkan non-yustisial dilakukan melalui sanksi-sanksi administratif seperti penyegelan, penertiban barang bukti, dan pemasangan stiker.

Selain itu dilakukan juga tindakan pencegahan melalui pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi kepada masyarakat dan badan hukum di wilayah Kota Bandung untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan produk hukum daerah sehingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani bisa hadir di Pemerintah Kota Bandung.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Di dalam rancangan awal RKPD 2019 program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk Satpol PP Kota Bandung telah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana bisa terlihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 11**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Bandung**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3,256,022,635.54</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3,256,022,635.54</b>	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 Laporan	183,600,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 Laporan	183,600,000.00	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	100,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Laporan	100,000,000.00	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bandung	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Laporan	84,753,739.39		Kota Bandung	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Laporan	84,753,739.39	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	53,472,063.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	53,472,063.00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	95,948,740.80	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Laporan	95,948,740.80	
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	12 Laporan	109,817,011.07	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	12 Laporan	109,817,011.07	
7	Kegiatan Penyediaan	Kota	- Jumlah Jenis	12		Kegiatan Penyediaan	Kota	- Jumlah Jenis	12		

	Barang Cetak dan Penggandaan	Bandung	Pengadaan Cetak Dan Penggandaan	Laporan	94,024,637.48	Barang Cetak dan Penggandaan	Bandung	Pengadaan Cetak Dan Penggandaan	Laporan	94,024,637.48
8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 Laporan	11,919,624.11	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 Laporan	11,919,624.11
9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis	4,215,015.20	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Laporan	4,215,015.20
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	52,674,806.40	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	52,674,806.40
11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	487,600,000.00	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	487,600,000.00
12	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	540,280,000.00	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	540,280,000.00
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	12 Laporan	1,437,716,998.08		Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	12 Laporan	1,437,716,998.08
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>3,356,983,398.45</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>3,356,983,398.45</b>

14	Kegiatan Pengadaan Peralengkapan Peralatan Aparatur	Kota Bandung	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	8 Jenis	41,560,000.00	Kegiatan Pengadaan Peralengkapan Peralatan Aparatur	Kota Bandung	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	- 2 jenis	41,560,000.00	
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	128,999,014.00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 laporan	128,999,014.00	
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	171 unit	3,173,396,920.00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	- 12 laporan	3,173,396,920.00	
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan peralatan komunikasi	12 Laporan	13,027,464.45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan peralatan komunikasi	12 laporan	13,027,464.45	
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>	<b>90%</b>	<b>416,268,341.00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>	<b>91.64%</b>	<b>416,268,341.00</b>	
18	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bandung	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	115 stel	71,148,000.00	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bandung	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	112 stel	71,148,000.00	
19	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kota Bandung	- Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	260 stel	151,527,000.00	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kota Bandung	- Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	265 stel	151,527,000.00	
20	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bandung	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	10 stel	193,593,341.00	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bandung	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	381 stel	193,593,341.00	
IV	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi</b>	<b>N/A</b>	<b>193,974,471.00</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi</b>	<b>80%</b>	<b>193,974,471.00</b>	
21	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Kota Bandung	- Jumlah laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	12 Laporan	193,974,471.00	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Kota Bandung	- Jumlah laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	12 laporan	193,974,471.00	

V	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Kota Bandung	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	-	3,253,213,421.00	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Kota Bandung	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	70.07%	3,253,213,421.00
22	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Bandung	Jumlah anggota tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang diperbantukan	495 Orang	2,541,300,000.00	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Bandung	Jumlah anggota tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang diperbantukan	90 Orang	2,541,300,000.00
23	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Bandung	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan dalam rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5 kali	412,515,000.00	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Bandung	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan dalam rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	18 Kali	412,515,000.00
24	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	Kota Bandung	jumlah siskamling RW terbina	N/A	299,398,421.00	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	Kota Bandung	jumlah siskamling RW terbina	50 RW	299,398,421.00
VI	Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	Kota Bandung	- cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	N/A	1,503,867,754.00	Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	Kota Bandung	- cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	75%	1,503,867,754.00
25	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	Kota Bandung	- Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	288 Kali	451,000,000.00	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	Kota Bandung	- Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	288 Kali	451,000,000.00
26	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Kota Bandung	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih	351 Orang	674,565,954.00	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Kota Bandung	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih	492 Orang	674,565,954.00
27	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	Kota Bandung	Jumlah Bintek penanganan Perkara Pelanggaran Perda	3 Bintek	378,301,800.00	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	Kota Bandung	Jumlah Bintek penanganan Perkara Pelanggaran Perda	3 Bintek	378,301,800.00

VII	<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	-	<b>17,158,529,340.00</b>	<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>17,158,529,340.00</b>
28	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	Kota Bandung	jumlah operasi yang bekerja sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum	N/A	1,808,200,000.00	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	Kota Bandung	jumlah operasi yang bekerja sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum	24 Operasi	1,808,200,000.00
29	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bandung	- Jumlah Patroli	1074 kali	250,818,750.00	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bandung	- Jumlah Patroli	1080 Kali	250,818,750.00
30	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bandung	Jumlah operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	180 Kali	15,099,510,590.00	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bandung	Jumlah operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	365 Operasi	15,099,510,590.00
VII	<b>Program Penegakan Produk Hukum daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	<b>100%</b>	<b>1,991,787,657.76</b>		<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	<b>100%</b>	<b>1,991,787,657.76</b>
31	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Kota Bandung	Jumlah Operasi pengamatan dan Penggambaran intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	4 Laporan	303,596,044.36	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Kota Bandung	Jumlah Operasi pengamatan dan Penggambaran intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	24 Operasi	303,596,044.36
35	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kota Bandung	jumlah Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100 Kali	1,504,956,131.00	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kota Bandung	jumlah Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100 Kali	1,504,956,131.00
36	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 laporan	183,235,482.40	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 Laporan	183,235,482.40

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja perangkat daerah dibuat tidak hanya merespon isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi langsung oleh perangkat daerah akan tetapi harus mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Usulan kegiatan *bottom-up* ini dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh masyarakat baik oleh tokoh masyarakat, forum warga, atau *stakeholder* lainnya untuk merespons terhadap permasalahan yang ada di akar rumput sehingga perencanaan pembangunan menjadi tepat sasaran.

Usulan-usulan kegiatan dari masyarakat yang tercantum di dalam rancangan rencana kerja kemudian dibahas dalam forum OPD Kota untuk menyelaraskan rumusan rencana kerja dengan hasil musrenbang tingkat Kecamatan.

Hasil penyelarasan usulan masyarakat kepada Satpol PP Kota Bandung dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 12**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
I	<b>Program Peyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat/ Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Cakupan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>				<b>Satuan: Kegiatan</b>
1		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Antapani Kelurahan ANTAPANI KIDUL RW 16	1	1	1.500.000	
2		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Warung Muncang RW 03	1	1	1.500.000	
3		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan CIPAMOKOLAN RW 06	1	1	1.500.000	
4		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bojongloa Kidul Kelurahan Situsaeur RW 07	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
5		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan babakan ciparay RW 02	1	1	1.500.000	
6		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan babakan ciparay RW 03	1	1	1.500.000	
7		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bojongloa Kaler Kelurahan Jamika RW 08	1	1	1.500.000	
8		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan MEKARJAYA RW 09	1	1	1.500.000	
9		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan MEKARJAYA RW 02	1	1	1.500.000	
10		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Cibeunying Kidul Kelurahan SUKAPADA RW 07	1	1	1.500.000	
11		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng RW 02	1	1	1.500.000	



NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
12		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Sukasari Kelurahan SARIJADI	1	1	1.500.000	
13		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Lengkong Kelurahan Cijagra RW 04	1	1	1.500.000	
14		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Mandalajati Kelurahan Pasir Impun RW 10	1	1	1.500.000	
15		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Kiaracondong Kelurahan Cicaheum RW 04	1	1	1.500.000	
16		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Gedebage Kelurahan RANCABOLANG RW 08	1	1	1.500.000	
17		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 11	1	1	1.500.000	
18		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 09	1	1	1.500.000	
19		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan CIPAMOKOLAN RW 01	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
20		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan CIGONDEWAH KALER	1	1	1.500.000	
21		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan babakan ciparay RW 06	1	1	1.500.000	
22		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Ujungberung Kelurahan PASIRWANGI RW 03	1	1	1.500.000	
23		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan MALEER RW 09	1	1	1.500.000	
24		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan MALEER RW 10	1	1	1.500.000	
25		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan MALEER RW 11	1	1	1.500.000	
26		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Ujungberung Kelurahan PASIRWANGI RW 05	1	1	1.500.000	
27		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
			Kelurahan MALEER RW 08				
28		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan MALEER RW 07	1	1	1.500.000	
29		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan MALEER RW 06	1	1	1.500.000	
30		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan CIPAMOKOLAN RW 05	1	1	1.500.000	
31		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan CIPAMOKOLAN RW 04	1	1	1.500.000	
32		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Sumur Bandung Kelurahan BRAGA	1	1	1.500.000	
33		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bojongloa Kidul Kelurahan CIBADUYUT RW 04	1	1	1.500.000	
34		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Cibuntu RW 08	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
35		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Cibuntu RW 08	1	1	1.500.000	
36		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Cinambo Kelurahan PAKEMITAN RW 05	1	1	1.500.000	
37		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 15	1	1	1.500.000	
38		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng RW 07	1	1	1.500.000	
39		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bojongloa Kidul Kelurahan KEBONLEGA RW 02	1	1	1.500.000	
40		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Cicendo Kelurahan Pasirkaliki RW 07	1	1	1.500.000	
41		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 16	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
42		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan MARGAHAYU UTARA RW 08	1	1	1.500.000	
43		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Ujungberung Kelurahan PASIR ENDAH RW 02	1	1	1.500.000	
44		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 13	1	1	1.500.000	
45		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Buahbatu Kelurahan Jatisari RW 02	1	1	1.500.000	
46		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Buahbatu Kelurahan Jatisari RW 02	1	1	1.500.000	
47		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleg RW 11	1	1	1.500.000	
48		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 06	1	1	1.500.000	
49		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
			RW 05				
50		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 07	1	1	1.500.000	
51		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 01	1	1	1.500.000	
52		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng RW 06	1	1	1.500.000	
53		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan Samoja RW 07	1	1	1.500.000	
54		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan Samoja RW 06	1	1	1.500.000	
55		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega RW 06	1	1	1.500.000	
56		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan Samoja RW 01	1	1	1.500.000	
57		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan MALEER	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
			RW 04				
58		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Cicendo Kelurahan PAJAJARAN RW 09	1	1	1.500.000	
59		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Cicendo Kelurahan PAJAJARAN RW 06	1	1	1.500.000	
60		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng RW 01	1	1	1.500.000	
61		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan Samoja RW 09	1	1	1.500.000	
62		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Ujungberung Kelurahan CIGENDING RW 11	1	1	1.500.000	
63		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Cicendo Kelurahan PAJAJARAN RW 04	1	1	1.500.000	
64		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng RW 10	1	1	1.500.000	
65		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Buahbatu Kelurahan SEKEJATI	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
			RW 08				
66		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Gedebage Kelurahan RANCABOLANG RW 06	1	1	1.500.000	
67		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan CIPAMOKOLAN RW 07	1	1	1.500.000	
68		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 14	1	1	1.500.000	
69		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bojongloa Kaler Kelurahan Kopo	1	1	1.500.000	
70		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega	1	1	1.500.000	
71		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng RW 05	1	1	1.500.000	
72		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Lengkong Kelurahan Paledang RW 01	1	1	1.500.000	
73		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Batununggal Kelurahan Binong RW 10	1	1	1.500.000	



NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
74		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Kiaracondong Kelurahan KEBON KANGKUNG	1	1	1.500.000	
75		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng	1	1	1.500.000	
76		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan Sukahaji	1	1	1.500.000	
77		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 12	1	1	1.500.000	
78		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Antapani Kelurahan ANTAPANI KIDUL RW 09	1	1	1.500.000	
79		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bojongloa Kaler Kelurahan Babakan Asih	1	1	1.500.000	
80		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Reses Dewan Haru Suandharu, SSi.,M.Si. Kec Mandalajati	50	50 Kegiatan	75.000.000	
81		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Cibeunying Kidul Kelurahan SUKAPADA RW 14	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
82		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bojongloa Kaler Kelurahan Jamika RW 02	1	1	1.500.000	
83		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan CIPAMOKOLAN RW 11	1	1	1.500.000	
84		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan CIPAMOKOLAN RW 08	1	1	1.500.000	
85		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan babakan ciparay RW 07	1	1	1.500.000	
86		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan babakan ciparay RW 07	1	1	1.500.000	
87		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bojongloa Kaler Kelurahan Jamika RW 05	1	1	1.500.000	
88		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Sukasari Kelurahan ISOLA RW 04	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
89		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Warung Muncang RW 04	1	1	1.500.000	
90		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 17	1	1	1.500.000	
91		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 10	1	1	1.500.000	
92		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Regol Kelurahan Cigereleng RW 04	1	1	1.500.000	
93		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Cigondewah Kidul	1	1	1.500.000	
94		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Cicendo Kelurahan Pasirkaliki RW 01	1	1	1.500.000	
95		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Bandung Kulon Kelurahan Caringin	1	1	1.500.000	
96		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Ujungberung Kelurahan CIGENDING	1	1	1.500.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME			CATATAN
				BESARAN	VOLUME	JUMLAH	
97		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Kiaracondong Kelurahan Babakan Surabaya	1	1	1.500.000	
98		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan CISARANTEN ENDAH	1	1	1.500.000	
99		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Antapani Kelurahan ANTAPANI KIDUL RW 10	1	1	1.500.000	
100		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Babakan Ciparay Kelurahan MARGAHAYU UTARA RW 01	1	1	1.500.000	
101		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Kiaracondong Kelurahan BABAKAN SARI RW 07	1	1	1.500.000	
102		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Rancasari Kelurahan Derwati RW 06	1	1	1.500.000	
103		Kota Bandung	Pelatihan Dasar untuk Anggota Linmas Kecamatan Arcamanik Kelurahan SUKAMISKIN RW 13	1	1	1.500.000	
<b>TOTAL</b>						<b>228.000.000</b>	

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahap IV Tahun (2020-2024) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Untuk mewujudkan kebijakan sistem hukum nasional yang mantap diperlukan partisipasi daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang diamanatkan urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satpol PP Kota Bandung menuangkan amanat ini ke dalam tiga indikator kinerja utama, yaitu *Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda*, *Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif*, dan *Cakupan Penyelesaian Gangguan Tibum Tranmas*.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada periode Tahun 2019-2023, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 13**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019-2023**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SATUAN	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Cakupan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Cakupan penyelesai penegekan Perda	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda Perwal}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda Perwal yang dilaporkan}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100
			2. Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Jumlah \% Penanganan unjuk rasa + \% Patroli + \% Penyuluhan Perda dan Perwal}}{3} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100
			3. Meningkatkan perlindungan masyaraat	$\frac{\% \text{ Patroli Anggota Linmas} + \% \text{ Siskamling aktif} + \% \text{ Anggota Linmas sesuai dengan kompetensi}}{3} \times 100\%$	%	62,49	64,05	65,67	67,29	68,91



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 3 indikator sasaran strategis yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun, dimana untuk tahun 2019 target kinerja yang harus dicapai untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Cakupan penyelesaian penegakkan perda sebesar 100% dimana untuk kiriteria penyelesaiannya adalah jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan atau di tindak oleh aparat dibagi jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat dan berdasarkan pantauan aparat di lapangan
2. Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 100% dimana untuk kriteria perhitungannya adalah jumlah penanganan unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2019 ditambah dengan persentase patroli dan persentase penyuluhan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi kepada aparat, masyarakat dan badan hukum dibagi 3(tiga);
3. Meningkatkan perlindungan masyarakat sebesar 62.49% dimana kriteria perhitungannya yaitu persentase patroli yang dilakukan oleh anggota linmas dalam menjaga kenyamanan lingkungan terutama di titik-titik rawan ditambah dengan persentase siskamling tingkat RW yang aktif dan persentase anggota linmas sesuai dengan kompetensinya minimal anggota linmas yang mendapatkan Diklatsar kelinmasan.

Untuk mencapai Indikator sasaran strategis tersebut maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang selaras sehingga dapat mempermudah Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Bandung untuk mencapainya.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berdasarkan tujuan, sasaran serta indikator sasaran, maka strategi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Meningkatkan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat.

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Dari uraian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2019-2023 dan program-program prioritas di dalam RKPD, Satpol PP Kota Bandung menyusun rencana kerja Tahun 2020 dan pendanaan dengan menetapkan 9 (sembilan)

program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan lokasi dan sasaran kegiatan wilayah Kota Bandung, Aparat, Masyarakat, dan Badan Hukum Kota Bandung. Sedangkan total kebutuhan pagu indikatif Tahun 2019 sebesar **Rp 31,130,647,019,-** (*tiga puluh satu miliar serratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan belas rupiah*). Uraian rencana program dan kegiatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 14**  
**Rumusan**  
**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1.5..1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3,256,022,635.54</b>	
1.5..1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 Laporan	183,600,000.00	
1.5..1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 Laporan	100,000,000.00	
1.5..1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bandung	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Laporan	84,753,739.39	
1.5..1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	53,472,063.00	
1.5..1.9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Laporan	95,948,740.80	
1.5..1.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	12 Laporan	109,817,011.07	
1.5..1.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bandung	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	94,024,637.48	
1.5..1.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 Laporan	11,919,624.11	
1.5..1.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis	4,215,015.20	
1.5..1.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	52,674,806.40	
1.5..1.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	487,600,000.00	
1.5..1.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	540,280,000.00	

1.5.1.23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	12 Laporan	1,437,716,998.08	
<b>1.5.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>3,356,983,398.45</b>	
1.5.2.12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Kota Bandung	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	8 Jenis	41,560,000.00	
1.5.2.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	128,999,014.00	
1.5.2.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	171 unit	3,173,396,920.00	
1.5.2.30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan peralatan komunikasi	-	13,027,464.45	
<b>1.5.3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>	<b>90%</b>	<b>416,268,341.00</b>	
1.5.3.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bandung	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	115 stel	71,148,000.00	
1.5.3.3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kota Bandung	- Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	260 stel	151,527,000.00	
1.5.3.5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bandung	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	10 stel	193,593,341.00	
<b>1.5.8</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi</b>	<b>N/A</b>	<b>193,974,471.00</b>	
1.5.8.1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Kota Bandung	- Jumlah laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	-	193,974,471.00	
<b>1.5.15</b>	<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase siskamling tingkat RW yang aktif</b>	<b>-</b>	<b>3,253,213,421.00</b>	
1.5.15.1	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Bandung	Jumlah anggota tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang diperbantukan	495 Orang	2,541,300,000.00	

1.5.15.3	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Bandung	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan dalam rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5 kali	412,515,000.00	
1.5.15.9	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	Kota Bandung	jumlah siskamling RW terbina	N/A	299,398,421.00	
<b>1.5.32</b>	<b>Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat</b>	<b>N/A</b>	<b>1,503,867,754.00</b>	
1.5.32.1	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	Kota Bandung	- Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi	288 Kali	451,000,000.00	
1.5.32.2	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Kota Bandung	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih	351 Orang	674,565,954.00	
1.5.32.3	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	Kota Bandung	Jumlah Bintek penanganan Perkara Pelanggaran Perda	3 Bintek	378,301,800.00	
<b>1.5.33</b>	<b>Progam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	
	<b>Progam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>-</b>	<b>17,158,529,340.00</b>	
1.5.33.1	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	Kota Bandung	jumlah operasi yang bekerja sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum	N/A	1,808,200,000.00	
1.5.33.2	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bandung	- Jumlah Patroli	1074 kali	250,818,750.00	
		Kota Bandung	- Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif	33 kali		
1.5.33.3	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bandung	Jumlah operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	180 Kali	15,099,510,590.00	
<b>1.5.34</b>	<b>Program Penegakan Produk Hukum daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	<b>100%</b>	<b>1,991,787,657.76</b>	

1.5.34.1	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Kota Bandung	Jumlah Operasi pengamatan dan Penggambaran intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	24 kali Operasi	303,596,044.36	
1.5.34.3	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kota Bandung	jumlah Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	-	1,504,956,131.00	
1.5.34.4	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	183,235,482.40	

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja serta pendanaan Satpol PP Kota Bandung mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kota Bandung yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019 ini juga mengacu pada program-program prioritas di dalam Rancangan RKPD yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2019-2023.

Visi Wali Kota Bandung periode 2019-2023 adalah ***Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis*** dengan penjabaran visi sebagai berikut:

**Kota Bandung:** Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.

**Unggul:** Dengan pencapaian berbagai prestasi pemerintah Kota Bandung yang diperoleh pada periode sebelumnya, maka ke depan sebagai petahana tidak hanya mempertahankan pencapaian yang telah diraih sebelumnya, namun juga terus berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk sektor yang lain serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan bagi pembangunan Kota Bandung.

**Nyaman:** Dengan pencapaian kualitas infrastruktur yang sudah dilaksanakan pada



periode sebelumnya, maka sebagai petahana harus menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan agar terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

**Sejahtera:** Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat kota bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis:** Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang merupakan manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2019-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga

masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2019-2023 maka ditetapkan beberapa misi yang terukur. Satpol PP Kota Bandung yang mempunyai tugas mengurus ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masuk ke dalam Misi ke-2 yaitu, *mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani*, tujuan ke-3, *meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap penegakkan hukum dan HAM*.

Dari uraian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2019-2023 dan program-program prioritas di dalam RKPD, Satpol PP Kota Bandung menyusun rencana kerja dan pendanaan dengan menetapkan 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan lokasi dan sasaran kegiatan wilayah Kota Bandung, Aparat, Masyarakat, dan Badan Hukum Kota Bandung. Sedangkan total kebutuhan pagu indikatif Tahun 2020 sebesar **Rp Rp 31,130,647,019,-** (*tiga puluh satu miliar serratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan belas rupiah*). Uraian rencana program dan kegiatan serta pendanaan Tahun 2019 serta perkiraan maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 15**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1.5..1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3,256,022,635.54</b>	
1.5..1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 Laporan	183,600,000.00	
1.5..1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 Laporan	100,000,000.00	
1.5..1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bandung	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Laporan	84,753,739.39	
1.5..1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan	53,472,063.00	
1.5..1.9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Laporan	95,948,740.80	
1.5..1.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	12 Laporan	109,817,011.07	
1.5..1.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bandung	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	12 Laporan	94,024,637.48	
1.5..1.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 Laporan	11,919,624.11	

1.5..1.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis	4,215,015.20	
1.5..1.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	52,674,806.40	
1.5..1.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	487,600,000.00	
1.5..1.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Bandung	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	540,280,000.00	
1.5..1.23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	12 Laporan	1,437,716,998.08	
<b>1.5.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>3,356,983,398.45</b>	
1.5.2.12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Kota Bandung	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan aparatur	8 Jenis	41,560,000.00	
1.5.2.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	128,999,014.00	
1.5.2.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	171 unit	3,173,396,920.00	
1.5.2.30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan peralatan komunikasi	-	13,027,464.45	

1.5.3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai</b>	<b>90%</b>	<b>416,268,341.00</b>	
1.5.3.2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bandung	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	115 stel	71,148,000.00	
1.5.3.3	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kota Bandung	- Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	260 stel	151,527,000.00	
1.5.3.5	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bandung	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	10 stel	193,593,341.00	
1.5.8	<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi</b>	<b>N/A</b>	<b>193,974,471.00</b>	
1.5.8.1	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Kota Bandung	- Jumlah laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	-	193,974,471.00	
1.5.15	<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase siskamling tingkat RW yang aktif</b>	-	<b>3,253,213,421.00</b>	
1.5.15.1	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Bandung	Jumlah anggota tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang diperbantukan	495 Orang	2,541,300,000.00	
1.5.15.3	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Bandung	Jumlah Pelatihan dan Pembinaan dalam rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5 kali	412,515,000.00	
1.5.15.9	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	Kota Bandung	jumlah siskamling RW terbina	N/A	299,398,421.00	
1.5.32	<b>Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat</b>	<b>N/A</b>	<b>1,503,867,754.00</b>	
1.5.32.1	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan	Kota Bandung	- Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang	288 Kali	451,000,000.00	

	Hukum		mengandung sanksi			
1.5.32.2	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	Kota Bandung	Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih	351 Orang	674,565,954.00	
1.5.32.3	Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	Kota Bandung	Jumlah Bintek penanganan Perkara Pelanggaran Perda	3 Bintek	378,301,800.00	
<b>1.5.33</b>	<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	
	<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>- Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>-</b>	<b>17,158,529,340.00</b>	
1.5.33.1	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	Kota Bandung	jumlah operasi yang bekerja sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum	N/A	1,808,200,000.00	
1.5.33.2	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bandung	- Jumlah Patroli	1074 kali	250,818,750.00	
		Kota Bandung	- Jumlah Pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif	33 kali		
1.5.33.3	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bandung	Jumlah operasi penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	180 Kali	15,099,510,590.00	
<b>1.5.34</b>	<b>Program Penegakan Produk Hukum daerah</b>	<b>Kota Bandung</b>	<b>Persentase Penegakan PERDA</b>	<b>100%</b>	<b>1,991,787,657.76</b>	
1.5.34.1	Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	Kota Bandung	Jumlah Operasi pengamatan dan Penggambaran intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	24 kali Operasi	303,596,044.36	

1.5.34.3	Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kota Bandung	jumlah Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	-	1,504,956,131.00	
1.5.34.4	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kota Bandung	- Jumlah laporan bulanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	183,235,482.40	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan dokumen tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dan berpedoman pada rancangan RPJMD Tahun 2019-2023 sehingga terdapat keselarasan di dalam perencanaan program-program prioritas dalam menunjang tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bandung sebagai perangkat daerah yang mengemban amanat urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari tersusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan tahunan ini dijadikan pedoman untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang pokok agar kinerja Satpol PP Kota Bandung lebih optimal.
2. Optimalisasi sumber daya yang ada di dalam organisasi Satpol PP Kota Bandung
3. Koordinasi dan sinergi dengan OPD dan instansi terkait, dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan atau pengadilan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung



diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dalam upaya mewujudkan Kota Bandung yang bermartabat.

Bandung, Agustus 2019  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANDUNG



**RASDIAN SETIADI,S.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690920 201410 1 001